



# Buletin Parlementaria

Nomor 984/II/XI/2017 • November 2017



**Terima Dubes Bangladesh  
Fadli Zon Tegaskan Bela Rohingya**

**Kementerian Kesehatan Diminta  
Prioritaskan Pengiriman  
Tenaga Medis ke Pulau Nias**

**Komisi IV DPR Kritisi  
Kondisi Gudang Pupuk  
Sriwijaya Kalbar**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN

# Komisi IV DPR Kritisi Kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya Kalbar



Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan meninjau Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat.

Komisi IV DPR RI mengkritisi kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat yang basah dan tidak memadai. Hal tersebut terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meninjau Pabrik Pupuk Sriwijaya, Wajo Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (29/10/2017).

“Kedatangan Kami (Komisi IV DPR) meninjau gudang pupuk ini untuk memastikan ketersediaan pupuk sekaligus pendistribusiannya ke seluruh wilayah di Kalimantan Barat ini agar tidak telat. Peralnya sekitar dua bulan yang lalu kami sempat mendapat laporan dari para petani Kalimantan Barat akan keterlambatan pasokan pupuk. Peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Namun setelah kami melihat sendiri, kami malah mendapati kondisi gudang pupuk yang kurang baik, lembab dan basah,” papar Daniel.

Kondisi gudang yang lembab dan basah tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas dari pupuk itu sendiri. Bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada produksi tanaman yang dihasilkan. Begitupun ketika

pendistribusian pupuk ke petani mengalami keterlambatan. Hal ini jelas akan membuat produksi beras dan tanaman lain anjlok.

“Bayangkan, di sini ada 500 ribu hektar. Karena pendistribusian pupuk yang telat maka akan berpengaruh pada produksinya. Kurang 1 ton per hektar saja, maka akan membuat total kerugian hingga 500 ribu ton, dan itu nilainya sudah triliunan rupiah. Angka yang sangat besar,” jelas Politisi dari Fraksi PKB.

Oleh karena itulah ia berharap agar perusahaan pupuk BUMN, seperti PT Sriwijaya ini lebih memperhatikan kondisi gudang. Apalagi gudang tersebut merupakan gudang sewaan yang sejatinya bisa lebih baik kondisinya. Tidak hanya itu, Daniel pun memperingatkan agar keterlambatan pendistribusian pupuk tidak

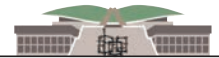
terjadi lagi.

Hal senada pun diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI lainnya, seperti Siti Herdiati Soeharto. Titeik, begitu ia biasa disapa, meminta PT Sriwijaya untuk lebih memperhatikan kondisi gudang pupuknya. Karena jika kualitas pupuk tersebut berkurang, maka akan sangat percuma alias tidak bisa dipakai lagi. Begitupun dengan ketersediaan dan pendistribusian pupuk ke masyarakat atau petani yang harus terus menjadi perhatian utama.

Terkait dengan permasalahan pupuk, Titeik juga menyoroati permasalahan kurang bayar pupuk yang terus terakumulasi dari tahun ke tahun. Ia meyakini dengan pengelolaan atau manajemen yang lebih baik lagi segala kurang bayar pupuk oleh pemerintah kepada BUMN akan dapat teratasi.

Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah memperbaiki manajemennya untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan kurang bayar kepada perusahaan pupuk. Hal tersebut semata demi perkembangan dan keberadaan BUMN pupuk itu sendiri. ■

(ayu/usc), Foto : Ayu/Andri



# Ketua DPR Desak Polri Usut Tuntas Penyebab Ledakan di Kosambi

Ledakan di gudang pengepakan kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di daerah Kosambi, Tangerang, pada Kamis (26/10) setidaknya telah menyebabkan 49 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut juga menyebabkan trauma bagi para pekerja dan masyarakat sekitar.



Ketua DPR RI Setya Novanto saat di Gedung DPR RI.

aparatus telah meminimalisir jatuhnya korban,” ucapnya.

Selain itu, Novanto meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti penyebab terjadinya ledakan tersebut. Novanto ingin ada kejelasan, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. “Kita jangan main-main dengan keselamatan kerja. Apalagi ini gudang kembang api. Perlu dicari tahu, apakah prosedur keselamatan sudah dilakukan atau belum,” ujar Novanto.

DPR RI tidak akan tinggal diam dalam menyikapi masalah ini, lanjutnya. “Komisi IX DPR sebagai mitra kerja Kementerian

Ketenagakerjaan akan membahasnya dalam Rapat Dengar Pendapat. Sekaligus ingin memastikan para pekerja disana, terutama keluarga yang menjadi korban meninggal dan luka-luka, terpenuhi haknya.

Novanto menyatakan bahwa kejadian ledakan itu harus dijadikan peringatan bagi seluruh perusahaan agar tak main-main dalam menerapkan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kita tidak boleh menyepelkan standar prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Saya harap semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia memperhatikan hal ini secara serius. Jika tidak, DPR bisa mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas. Nyawa manusia tak ternilai harganya,” pungkasnya. ■

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Ketua DPR RI Setya Novanto mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia dalam insiden itu.

“Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Doa saya menyertai para korban. Bagi yang meninggal dunia, Insya Allah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” tutur Novanto Jumat (27/10) di Jakarta.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat aparat kepolisian yang telah berusaha keras menyelamatkan para korban. “Bahkan saya dengar anggota Brimob sampai menjebol tembok untuk memberikan akses kepada para korban agar bisa menyelamatkan diri. Kerja keras

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
Nur Sakila Rahmah, S.Ikom  
**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

(dep.mpr), Foto : Jaka/Andri

## Kepada Dubes Bangladesh Fadli Zon Tegaskan Bela Rohingya

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan sikap DPR terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, DPR mengutuk krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Oleh karena itu, DPR akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengungsian Rohingya di Bangladesh pada awal Desember 2017.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Dubes Bangladesh Major General Azmal Kabir, di Ruang Kerjanya.

General Azmal Kabir, di Ruang Kerjanya, Rabu (01/11/2017).

Politisi Gerindra ini menilai bahwa isu Rohingya adalah bentuk kejahatan internasional yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Upaya untuk membuat Rohingya menjadi isu internasional sudah didorong oleh DPR melalui acara World Parliamentary Forum dengan memasukan isu Rohingya ke dalam resolusi.

Presiden Jokowi pun dituntut turun langsung ke lapangan meninjau kondisi pengungsian di Rohingya yang berjumlah 1.1 juta jiwa. "DPR sudah berusaha untuk mendorong masalah Rohingya ini menjadi isu kejahatan kemanusiaan. Kami meminta perhatian dunia internasional. Jika diperlukan, Presiden Jokowi bisa meninjau langsung tempat pengungsian di Bangladesh yang berjumlah 1.1 juta orang Rohingya di sana," jelas Fadli Zon.

Di kesempatan yang sama, Dubes Bangladesh Azmal Kabir juga menaruh harapan Indonesia mampu memiliki peran yang lebih besar dalam menyelesaikan kasus Rohingya, mengingat penderitaan yang dialami pengungsi Rohingya sudah tidak dapat dibantahkan lagi. Indonesia diharapkan menjadi motor utama dalam memberikan perhatian dunia internasional kepada Rohingya.

"Penderitaan pengungsi Rohingya sudah tidak tertanggguhkan lagi. Indonesia dan seluruh dunia diharapkan beri perhatian bagi krisis kemanusiaan ini. Bangladesh meminta Indonesia memiliki peran yang lebih besar," tutup Azmal Kabir. ■

**F**adli Zon juga minta pemerintah turut pro aktif dalam memberikan perhatian kepada krisis kemanusiaan di Rohingya. Mengingat, Indonesia adalah negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Sikap tegas Indonesia nantinya akan diikuti oleh negara ASEAN lainnya.

"Presiden Jokowi harus beri perhatian lebih sebagai pemimpin Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang demokrasiya maju. Perlu buat langkah yang tegas terhadap pemerintah Myanmar, karena kalau Indonesia tidak tegas, bagaimana dengan yang lain. Ini yang dibutuhkan," ujar Fadli Zon usai menerima Dubes Bangladesh Major

(hs/sc) Foto : Andri/and

## Pembangunan Gedung DPR Diserahkan Kepada Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan, pihaknya menyerahkan secara penuh pembangunan gedung baru DPR kepada pemerintah. Hal itu pun terlihat pada rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“DPR menyerahkan sepenuhnya pembangunan gedung kepada pemerintah. Dan (hal itu) juga sudah disampaikan secara langsung pada saat rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan beberapa kali,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Politisi F-PAN itu menambahkan, gedung DPR merupakan inventaris negara. Oleh karena itu, soal pembangunan dan perawatannya tak perlu digiring ke ranah politik. DPR



pun telah menyerahkan desain dan teknis pembangunan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).

“Pembangunan gedung baru ini juga sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang kerap berkunjung dan beraudiensi. Banyak yang menginginkan adanya perbaikan. Keinginan DPR (membangun gedung) itu juga didasarkan pada kondisi bahwa gedung saat ini yang ada sudah tidak memadai,” imbuh Taufik.

Taufik mengakui memang ada alokasi anggaran pembangunan untuk gedung DPR RI. “DPR memberikan apresiasi

kepada pemerintah. Namun pelaksanaannya semua tergantung pemerintah,” ujarnya.

Menurut Taufik, dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke Kementerian PU-PR dan Kesekjenan DPR. Artinya surat, administrasi, dokumen, segala macam itu sudah disiapkan kesekjenan. Pimpinan sepakat untuk ini tidak boleh dikaitkan dengan isu politisasi. ■

(st/imp), Foto : Andri/Andri



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat di wawancara usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI.

## 75 Persen Prolegnas Berasal Dari Pemerintah

Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Dia bahkan minta kepada DPR tidak usah setahun 40 Undang-Undang, tetapi cukup 1 atau 2 asal berkualitas.



Wakil Ketua Fahri Hamzah saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR RI.

memasukkan RUU ke DPR,” katanya.

Lantas, Wakil Ketua DPR Korkesra itu pun membeberkan bahwa dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, pemerintah mengusulkan sebanyak 51 RUU. Belum lagi RUU yang diusulkan bersama DPR dan RUU Kumulatif.

“Itu mungkin dia yang nggak paham, jadi yang paling banyak memesan UU itu dari eksekutif,” ujar Fahri.

Bahkan, dirinya menyarankan kalau Presiden Jokowi tidak dibuat pusing atau repot, maka jangan memasukan lagi usulan RUU ke DPR.

“Karena yang paling banyak ngasih kerjaan ke DPR, kan Pak Jokowi,” imbuh politisi PKS itu.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017), Presiden Jokowi menyoroti banyaknya aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Bahkan dia meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi, yang penting regulasi yang dibuat berkualitas.

“Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, untuk mempercepat lari kita,” kata Presiden Jokowi. ■

**M**enanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat dihubungi, Rabu (25/10/2017) justru menilai kalau pernyataan Presiden Jokowi itu

bertolak belakang dengan apa yang terjadi.

“Mungkin Pak Jokowi tidak dapat berita bahwa 75 persen Prolegnas itu berasal dari eksekutif (pemerintah). Justru, Pak Jokowi paling banyak yang

(sc), Foto : Oji/Andri



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima dokumen usulan revisi UU Ormas dari F-Demokrat, di Gedung DPR RI.

## FPD DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI akhirnya resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI. Penyerahan dokumen ini merupakan komitmen FPD yang mendesak pemerintah segera merevisi UU tersebut setelah Perppu No.2/2017 disahkan di Rapat Paripurna DPR.

**K**etua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Hince Panjaitan menyerahkan langsung dokumen usulan revisi tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). "Ini merupakan usul inisiatif kami sekaligus komitmen dan iktiar politik Fraksi Partai Demokrat," ucap Ibas, sapaan akrab Edhie

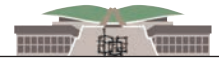
Baskoro Yudhoyono.

Menurut Ibas, dokumen usulan ini menjadi buku putih dari fraksi yang dipimpinnya menyangkut UU Ormas. Selama ini, FPD menilai ada beberapa pasal dalam UU itu yang masih tidak sesuai dengan konstitusi. Misalnya, soal penetapan suatu Ormas yang bertentangan dengan Pancasila secara sepihak. FPD masih melihat politis soal penetapan itu. Harusnya penetapan Ormas anti-Pancasila berdasarkan

hukum.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima delegasi FPD itu mengatakan, dengan diserahkan usulan revisi berikut naskah akademiknya, berarti resmi sudah FPD DPR menginisiasi revisi UU Ormas kepada DPR. Tinggal menunggu proses selanjutnya untuk dibicarakan di rapat Bamus atau rapat pimpinan pengganti rapat Bamus. Saat ini belum bisa segera ditindaklanjuti, lantaran sudah masuk masa reses. ■

(mh/sc) Foto : Jaka/Andri



# Operasionalisasi BLK Harus Diisi Tenaga Kompeten

Komisi IX DPR memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah kota Manado dalam mengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan meningkatkan kapasitas angkatan kerja dalam menghadapi dunia kerja.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri dan Tim Kunker Komisi IX DPR RI saat meninjau BLK Kota Manado.

**H**al itu tercermin dari upaya pembangunan yang dilakukan di BLK Manado, meski demikian diingatkan bahwa pembangunan BLK juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga pelatih yang kompeten.

“Kita beri apresiasi pada Pemkot Manado yang semangat membangun BLK. Ini salah satu upaya mengantisipasi ledakan angkatan kerja supaya mereka bisa mengisi lapangan

kerja secara lebih kualitas,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai meninjau BLK Kota Manado, Jumat, (27/10).

Ia menegaskan bahwa generasi millennial harus mampu mengisi peluang kerja di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Sehingga menyiapkan masyarakat yang berpendidikan dan terampil multak dilakukan.

“Kita harus mengisi peluang bonus demografi dengan menyediakan masyarakat

yang berpendidikan, kesehatan yang baik dan menyiapkan keterampilan supaya bisa berpartisipasi dalam peluang kerja,” sambungnya.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan bahwa pembangunan BLK harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi juga peningkatan operasionalisasi dan tenaga pendidiknya. Ini yang kerap dilupakan oleh pemerintah daerah, sehingga sering ditemukan BLK di daerah-daerah yang terbengkalai.

“Komisi IX DPR menyambut baik semangat Pemkot Manado. Kami mengingatkan pembangunan BLK itu lebih mudah, yang jadi persoalan adalah kelanjutan BLK itu, termasuk yang terkait biaya operasional, pengadaan tenaga pelatih dan lain-lain. Itu yg sering jadi persoalan,” jelas Syamsul.

Karenanya, Komisi IX menaruh perhatian terhadap tindak lanjut BLK ini agar mampu menghasilkan masyarakat yang memiliki kompetensi ditengah maraknya tenaga kerja asing dan menghadapi arus globalisasi yang menempatkan kompetensi sebagai faktor yang paling diutamakan dalam lapangan kerja. ■

(ins.mp), Foto: hendra/Andri



Bagian Penerbitan, Biro Pemberitaan Setjen dan BK DPR RI melakukan pertemuan dengan Direktur Umum RSUP Persahabatan drg. Setiawaty, MKes terkait permohonan izin penempatan rak display Majalah dan Buletin Parlemenaria (2/11). RSUP Persahabatan bersedia menyiapkan area bagi penempatan rak display.

Foto: F. Munchen/penerbitan



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman dan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meninjau Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat.

## Kasus Pencari Suaka Politik Harus Diselesaikan di Taraf Internasional

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menilai, kasus Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi pengungsi sebagai Political Asylum Secret atau Pencari Suaka Politik di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia melainkan masalah internasional. Oleh karenanya harus ada penyelesaian yang sifatnya diplomatik di level internasional.

**H**al tersebut diungkapkan saat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meninjau Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kalimantan Barat dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Kalbar Rochadi Iwan Santoso beserta Jajarannya, Senin (30/10/2017).

Selama menjadi penghuni Rumah Detensi, para WNA tersebut dibiayai dan diurus oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Salah satu

yang menyebabkan mereka menjadi para pencari suaka politik adalah karena kehabisan uang dan menyerahkan diri ke pihak Rumah Detensi, atau adanya masalah di negara asalnya.

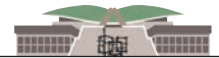
Menindaklanjuti adanya UNHCR yang mengurus para WNA tersebut, Benny mengungkapkan, jangan hanya karena UNHCR melakukan tugasnya di aspek kemanusiaan, justru membuat para WNA nyaman dan tidak ingin pulang ke negara asalnya.

"Ya UNHCR itu kan aspek

kemanusiaan, tentu membantu aspek sisi kemanusiaan dan tentu sangat kita dukung tetapi jangan juga karena alasan itu kemudian mereka berlama-lama di sini. Maka tadi saya katakan harus ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah ini yang berhubungan dengan pemulangan mereka ke negara asalnya," papar Benny.

Senada dengan Benny, Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik memaparkan, Rumah Detensi





Imigrasi di Pontianak, Kalimantan Barat menampung sekitar 150 pengungsi dari Afghanistan, sebagian besar mereka dari Etnis Hazara. Etnis Hazara merupakan Etnis Minoritas di Afghanistan, mereka beragama Islam tetapi alirannya berbeda yaitu beraliran Islam Syiah, sehingga mereka mengalami masalah di Afghanistan. Para WNA yang tinggal di Rumah Detensi rata-rata sudah 3 tahunan.

“Masalahnya adalah mereka ini mencari suaka Politik atau Asilum ke beberapa negara khususnya negara Australia. Cuma kan sampai sekarang proses di Australia mereka tidak mau menerima dengan mudah para pencari suaka ini, sehingga kemudian para pengungsi dari Afghanistan ini diurus oleh UNHCR,” kata Politisi Partai Demokrat tersebut.

Dari sisi anggaran, para WNA yang tinggal di rumah Detensi diurus oleh lembaga PBB yang mengurus masalah Imigrasi atau IOM (International Organization Migration). Pemerintah Indonesia hanya menyediakan Rumah Detensi. Yang menjadi masalah kata Erma, adalah ketika para suaka politik tersebut diasemiliasi ke masyarakat.

“Komisi III berkepentingan untuk menjenguk ke situ karena kami tidak mau ada pengungsi-pengungsi para pencari suaka yang kemudian sampai bebas berkeliaran keluar. Kita takut mereka melakukan pelanggaran hukum. Jaman sekarang kan banyak peredaran gelap narkoba, kita sama-sama tahu jalur narkoba dari arah Afghanistan sangat tinggi. Kita juga tahu di sana juga orang menanam kopi atau semacam bahan baku heroin itu sangat mudah dan memang di sana tingkat orang untuk mendapatkan narkoba terlalu tinggi. Saya tadi secara khusus mengingatkan mereka bahwa meminta supaya diasimiliasi ke penduduk lokal. Kita tidak mau, karena kalau mereka berbaur dengan masyarakat kita takut akan lebih banyak terjadi hal-hal mudhoratnya dibanding manfaatnya,” paparnya mantap.

Dalam Kunjungan tersebut, selain Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat, Benny didampingi Anggota Komisi III DPR RI yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Ahmad Zacky Siradj (F-PG), Arteria Dahlan, Ichsan Soelistio (F-PDIP), Akbar Faisal, dan Ali Umri (F-Nasdem). ■

(ndy/sc), Foto : Nadya/Andri

## Kementerian Kesehatan Diminta Prioritaskan Pengiriman Tenaga Medis ke Pulau Nias

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay minta Kementerian Kesehatan RI untuk segera memprioritaskan pengiriman tenaga medis ke lima kabupaten/kota di Pulau Nias.



Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan pertemuan dengan Bupati Nias Selatan di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Sumatera Utara

“Kami minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI segera memprioritaskan pengiriman tenaga medis ke Pulau Nias untuk lima kabupaten/kota ini,” kata Saleh usai melakukan pertemuan tim dengan Bupati Nias Selatan di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Sumatera Utara, Jumat (27/10/2017).

Hal tersebut disampaikannya terkait adanya beberapa temuan Tim Komisi IX di Nias yang dinilainya sangat memprihatinkan, yaitu soal penanganan dan pelayanan kesehatan, puskesmas yang tidak ada dokternya, RSUD yang tidak ada dokter giginya dan juga tidak ada dokter spesialisnya. Selain itu, ketersediaan peralatan dan obat-obatan yang pemasokannya selalu berkurang dan bahkan ada juga yang sudah kadaluwarsa.

“Di Nias ini Balai Latihan Kerja (BLK) sudah ada tapi belum dimaksimalkan dan dimanfaatkan secara benar, kami juga minta pembangunan BLK segera direalisasikan,” tambah Saleh.

“Inilah hal penting dan pokok yang kami dapatkan dalam kunjungan di Nias ini, mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti dan di proses dengan baik agar segera direalisasikan di tahun yang akan datang,” tutupnya. ■

(chas/sc), Foto : Chasbi/Andri

# Bulog Dituntut Selalu Inovatif

Setiap perusahaan menginginkan peningkatan dan kemajuan yang terus berkelanjutan, maka penting untuk sebuah perusahaan menjadikan inovasi sebagai budaya, langkah krusial yang harus selalu ada.

“Inovasi dalam suatu kegiatan usaha itu penting jangan karena diberi sesuatu mandat selalu oleh pemerintah terus terlena, dia juga harus ikut berfungsi sebagai usaha sebagai bisnis korporasi. Contohnya saja yang sudah dilakukan Bulog yaitu rumah pangan kita, ini perpanjangan dari kerja Bulog” ujar Edhy Prabowo (F-Gerindra) saat memimpin Tim Komisi IV DPR RI, Jumat (27/10/2017) di Gudang Bulog Pasir Putih Divre Jambi.

Selain itu ia menambahkan peran Bulog langsung dalam perdagangan pasar ini adalah untuk stabilisasi harga, apalagi menurutnya harga

berbagai komoditas pangan khususnya beras sering dipermainkan di pasar.

Direktur Komersial Bulog Febriyanto memaparkan bahwa Bulog berfungsi sebagai stabilisator dan menangani keterjangkauan dan ketersebaran komoditas di seluruh nusantara dengan konsep subsidi silang. Namun dengan adanya konsep Bansos adalah free market “ maka Bulog akan masuk ke fungsi komersial murni. Dimana harga komoditi akan menyesuaikan harga pokok penjualan komoditas. Di sinilah Bulog masuk dengan berperan langsung sebagai stabilisator harga.

Pelaksanaan peran dan fungsi Bulog ini juga mendapat dukungan

Komisi IV DPR RI bahwa Bulog sudah seharusnya dikuatkan karena telah mempunyai infrastruktur sampai ke kecamatan-kecamatan, pelosok daerah.

“Kami berharap Bulog diberi peran yang besar karena sudah terbiasa, telah berpengalaman dan sudah terbukti kerjanya makin bagus dengan gudang yang memadai untuk menyimpan komoditas dengan kualitas terjaga,” terang anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin (F-PKS).

Pihaknya melihat dari gudang yang cukup bagus maka kualitas beras dan gula yang disimpan cukup terjamin. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengatasi kelangkaan gula maupun beras.

“Kita terus dorong agar tidak ada pemotongan subsidi, dengan kualitas Rastra ataupun beras yang dijual ke masyarakat menjadi baik, sehingga Perum Bulog ke depannya betul-betul lebih maksimal lagi dalam mendukung terpenuhinya pangan,” pungkas Andi. ■



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau Gudang Bulog Pasir Putih Divre, Jambi.

(ran/sc) | Foto : Rizka/Andri



# Komisi VII Minta Revitalisasi Danau Limboto Dipercepat



Tim Kunker komisi VII saat meninjau kawasan strategis Danau Limboto di Provinsi Gorontalo

akibat erosi dan sedimentasi yang terus terjadi ditakutkan mengancam ekosistem yang ada di danau itu sendiri.

Untuk itu, politisi dari F-Golkar ini meminta pemerintah pusat, setidaknya melibatkan 9 Kementerian untuk segera melakukan pembenahan dan restorasi Danau Limboto. Sebab, apabila tidak dilakukan penataan yang baik, kemungkinan akan terjadi erosi karena sedimentasi dan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi daratan.

“Kita menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan fiskal, tetapi tentunya kita akan mendorong pengembangan danau kategori kritis menjadi prioritas. Itu yang akan menjadi pesan Komisi VII kepada pemerintah dalam rapat Komisi maupun rapat Banggar,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Andi Yuliani Paris juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan restorasi danau secara integral guna mengembalikan fungsi danau seperti sedia kala. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai leading sector harus bekerja sama dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sebab untuk mengeruk danau itu, program Kementerian PUPR dan KLHK juga harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk merealokasi masyarakat yang tinggal di sekitar danau. Pelibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan, supaya masyarakat betul-betul menjaga danau tersebut,” ungkap politisi PAN ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha menekankan Danau Limboto adalah salah satu aset nasional (national heritage) yang patut dijaga dan dilestarikan. Karenanya, penyelamatan danau perlu dipercepat. Mengingat kondisi Danau Limboto sudah sangat memprihatinkan akibat proses sedimentasi sehingga hal ini butuh perhatian serius dari pemerintah.

“Danau Limboto menjadi salah satu danau yang kritis di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” ungkap Satya saat memimpin peninjauan Tim Kunker Komisi VII ke kawasan strategis Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Selasa (31/10/2017).

Seperti diketahui, Danau Limboto masuk dalam daftar 15 danau kritis yang ada di Indonesia, karena terus mengalami pendangkalan. Pada era 1950-an, Danau Limboto memiliki kedalaman hingga 27 meter dan pernah menjadi landasan pacu bagi pesawat amfibi yang ditumpangi Presiden

pertama Indonesia, Soekarno. Namun, kini kedalaman danau hanya sekitar 2,5 meter saja. Selain itu, pendangkalan



la menambahkan, Danau Limboto diharapkan menjadi salah satu objek wisata di Provinsi Gorontalo, yang nantinya bisa dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia. ■

(ann/sf/sc) foto: Anne/and



Foto bersama penerima Lencana Karya Satya usai upacara peringatan Sumpah Pemuda di Gedung DPR RI

## 120 Pegawai Raih Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Sebanyak 120 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD RI meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan ini disematkan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang sudah mengabdikan selama sepuluh tahun.



**P**ada Upacara Peringatan Sumpah Pemuda yang digelar Senin (30/10/2017) pagi di halaman gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR itu, penyematanencana langsung diberikan oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI. Pemberian penghargaan ini berdasarkan Keputusan Presiden No.67/TK/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Bertindak sebagai inspektur upacara Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Dalam upacara kali ini,

selain pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga dibacakan Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928. Momentum Sumpah Pemuda ini, ingin mengingatkan kekuatan pergerakan pemuda Indonesia yang mampu menyatukan visi kebangsaan untuk Indonesia merdeka.

Dalam sambutannya, Ma'ruf membacakan salinan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi. Salah satu petikannya mengatakan, para pemuda dari berbagai daerah terpencil di Indonesia bertemu di Kwitang, Jakarta untuk mendeklarasiakn suara pemuda Indonesia. Tersebutlah nama Moh.

Yamin dari Swahlunto, Sumatera Barat, Yohanes Leimena dari Ambon, Maluku, dan Katjasungkana dari Madura, Jawa Timur.

Ketiga tokoh pemuda ini merupakan representasi kelompok pemuda waktu itu yang berjumlah 71 pemuda dari seluruh Tanah Air. Mereka datang dengan menumpang kapal laut berminggu-minggu untuk sampai ke lokasi kongres di Jakarta. Deklarasi dan komitmen bersama pun disuarakan, yaitu Bertanah Air Satu Bangsa Indonesia, Berbangsa Satu Bahasa Indonesia, dan Berbahasa Satu Bahasa Indonesia. ■

# Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern

Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudahkan para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat membuka acara sosialisasi PPNPN untuk tenaga ahli dan staf Administrasi Anggota DPR RI Secara Online, di Gedung DPR RI.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso saat membuka acara Sosialisasi Pendaftaran Administrasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Secara Online, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (01/11/2017).

Salah satu yang perlu dibenahi menuju parlemen modern adalah sistem administrasi para tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Menurut Agung, pembenahan administrasi para TA dan staf anggota menjadi penting untuk menunjang kinerja para wakil rakyat. Seperti diketahui, ada tiga indikator parlemen modern, yaitu pertama, peran dan fungsi DPR berjalan baik dan optimal.

Kedua, lanjut Agung, mudah diakses publik, sehingga publik bisa menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam kerja DPR. Dan ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk

menunjang kerja DPR. “Visi misi DPR periode ini adalah modern, berwibawa, dan kredibel. Sebagai lembaga yang modern perlu ditunjang dengan teknologi

informasi yang tepat dan baik. Jadi membangun DPR RI sebagai parlemen yang modern merupakan keniscayaan,” ujar Agung.

Di sini peran para tenaga ahli staf anggota sangat strategis untuk menunjang DPR menuju komitmennya menjadi parlemen modern. Seperti diketahui, DPR merupakan dapur produk legislasi nasional. Berbagai perundang-undangan dibahas bersama pemerintah di DPR. Para tenaga ahli dan staf anggota berada di balik layar kiprah para legislator yang sibuk merumuskan UU.

Sebelumnya, Plt. Sekjen DPR RI Damayanti mengungkapkan, peserta yang ikut dalam sosialisasi ini berjumlah sekitar 2.640 orang yang terdiri dari tenaga ahli anggota dan staf administrasi anggota. Selama ini pendaftaran tenaga ahli masih konvensional, sehingga para tenaga ahli dan staf itu harus pergi ke gedung Sekjen berkali-kali. Kini dengan sistem online, sudah bisa mendaftarkan identitas dirinya secara cepat dan akurat.

Sistem pendaftaran online ini juga untuk menunjang akses BPJS, pajak, dan lain-lain. Data yang diinput itu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kejujurannya. Intinya, semua ini untuk kemudahan akses kerja para tenaga ahli dan staf anggota, sehingga efeknya bisa menunjang kinerja para anggota dewan menjadi lebih baik. ■

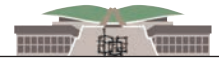
Foto: Oji/Andri

## PP No 99 Tahun 2012 Perlu Dievaluasi

Peraturan Permerintah (PP) No.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perlu dievaluasi segera. Evaluasi dibutuhkan untuk menyikapi perubahan sikap para narapidana kasus narkoba dan terorisme yang kini menjadi lebih baik.

Anggota Komisi III Abdul Kadir Karding menyampaikan hal tersebut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III, Senin (30/10/2017). Para narapidana yang menunjukkan perubahan sikap yang baik itu bisa diberikan remisi.

“Napi narkoba itu korban, tidak perlu dipenjarakan tetapi direhabilitasi. Tujuan orang untuk menghukum itu adalah memperbaiki cara hidup,” ungkap Karding saat



# NTB Bisa Jadi Contoh Penyaluran KUR Bagi Daerah Lain

Komisi XI DPR RI sangat terkesan dengan penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berjalan cukup baik. Apalagi penyaluran KUR ini telah diperiksa dan dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi atau kabupaten lain bagaimana dalam penyaluran KUR dengan laporan administrasi keuangan yang baik. Tidak ada penyelewengan apalagi korupsi,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja ke NTB di Mataram, Senin (30/10/2017).

Tim menggelar pertemuan dengan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, anggota Dewan Komisiner OJK Tirta Segara, BPS, Perbankan dan PT Askrido serta Perum Jamkrindo.

Menurut Soepriyatno, peran perbankan khususnya dalam penyaluran KUR mempunyai posisi



Ketua Tim Kunker Komisi XI Soepriyatno bertukar cinderamata dengan Dewan Komisiner OJK Tirta Segara

penting dalam pembangunan daerah. Khususnya di NTB, KUR untuk UMKM dan koperasi telah memajukan sektor ini ditambah NTB kini menjadi daerah tujuan wisata yang potensial.

Anggota Tim Kunker Wilgo Zainar mengharapkan KUR disalurkan juga ke masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan bankable tapi usahanya visible terutama dibawah Rp 25 juta dan jangan dibebankan oleh

adanya agunan.

“Kita berharap keberpihakan perbankan pada sektor mikro, UMKM, pertanian dan peternakan yang menjadi konsen pemerintah dalam mendorong perekonomian yang tumbuh dari masyarakat,” kata politisi Gerindra dari Dapil NTB ini.

Hal senada diharapkan anggota Tim Nurhayati Ali Assegaf supaya dipikirkan akses kepada masyarakat mendapatkan KUR dengan mudah. Dalam kaitan ini Jamkrindo selaku penjamin bisa bekerja sama dengan bank penyalur supaya kredit itu bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

“Dengan KUR diharapkan masyarakat tidak lagi terlibat dengan bank-bank rentenir,” tegasnya. Anggota DK OJK Tirta Segara menjelaskan realisasi KUR pada September 2017 mencapai Rp 69,68 T atau 65,34 persen.

Khusus untuk NTB penyaluran KUR hingga Agustus 2017 mencapai Rp2,5 T. Rinciannya perdagangan besar dan eceran 63,15 persen, pertanian, perburuhan dan kehutanan 21,75 persen dan industri pengolahan 4,6 persen. ■

(mp/sc), Foto : Mastur/arf



Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding (kiri) saat mengikuti kunjungan kerja komisi III DPR RI, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

rapat dengan Kanwil Hukum dan HAM di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin.

Politisi Dari F-PKB menambahkan, kebanyakan penghuni Lapas dihuni oleh napi narkoba. Dan penyakit utama lapas adalah over kapasitas yang harusnya dihuni oleh 400 orang menjadi 2.346. Ini sungguh tidak manusiawi dan hampir terjadi di semua Lapas di seluruh Indonesia.

“Saya melihat pertumbuhan cepat terpidana cukup besar, oleh karena itu harus ada solusi lain. Bahkan, untuk makan saja tiap tahun, anggaran APBN tidak kurang dari Rp 1 triliun untuk seluruh Indonesia. Saya mendorong pemerintah untuk membangun Lapas, mengembangkan, serta memperluas Lapas yang over kapasitas,” kata Sekjen DPP PKB itu.

Gebrakan solusi baru dari pemerintah harus ada, baik melalui undang-undang dan masalah kompensasi bagi narapidana. Perubahan instrumen hukum lainnya juga perlu dilakukan, agar persoalan Lapas bisa teratasi dengan baik. ■

(rief/sc), Foto : Arief/And

# Peningkatan Perekonomian Belum Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan

Komisi XI DPR RI mengapresiasi peningkatan perekonomian yang sangat baik di Sulawesi Selatan. Namun, peningkatan perekonomian tersebut masih belum berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.



Suasana Rapat Tim Kunjungan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**W**akil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan mengatakan, secara umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun ini menjadi provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Selama 3 tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Sulawesi Selatan selalu

mencapai pertumbuhan di atas rata-rata nasional, mendekati 7 persen, sementara pertumbuhan nasionalnya hanya 5 persen.

Namun demikian. Dia melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan ini, belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini masih dapat dilihat dengan masih tingginya gini ratio dan masih tingginya angka kemiskinan meskipun angkanya menunjukkan dibawah rata-rata nasional," katanya, saat memimpin Kunjuran, di Makassar, Senin (30/10/2017).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dibenahi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat.

Oleh karena itu, distribusi kesejahteraan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sehingga pertumbuhan yang tinggi itu kedepan kita harapkan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dibawah monitoring pemerintah pusat bisa lebih tajam menentukan arah kebijakan program-programnya, sehingga pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," tegasnya. ■

(es/sc), Foto : Agung/Art

## Komisi VII Dorong Sumber Kedaulatan Energi Aceh

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam mendorong potensi energi yang ada di Tanah Rencong ini agar bisa menopang kedaulatan energi nasional. Pasalnya menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan survei geologi dan geofisika kelautan menemukan cadangan migas yang amat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Bahkan diperkirakan yang terbesar di dunia, yakni Rp 320,79 miliar per barel.

**K**etua Tim Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan "Ketersediaan energi alam di Aceh luar biasa cukup, tadi dilaporkan oleh BPPT, tahun 2010 melakukan riset, ternyata di Aceh Barat ada temuan, potensi migas Rp 230 miliar/barel, kalau ini betul Aceh

menjadi penghasil migas terbesar. "Saya kira kita dorong ini, ini bukan hanya untuk aceh, tapi untuk NKRI, untuk Merah Putih, Indonesia," paparnya di NAD, Senin (30/10/2017) malam.

Gus Irawan mengungkapkan hasil laporan ini akan dibawa ke Jakarta, dibahas oleh para pengambil kebijakan, agar

dikelola secara baik dan tepat sehingga bisa digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sepenuhnya. "Bahwa kita punya cita-cita untuk berdaulat secara energi. Sementara ada temuan sesungguhnya potensi di Aceh Barat itu cukup besar, kita akan kawal dan dorong itu," ungkapnya.

Meskipun demikian, Gus Irawan mengatakan, temuan ini barulah riset awal perlu kajian lebih mendalam lagi. "Komisi VII akan mendorong ini, karena ini kan baru riset awal ya, perlu riset yang lebih mendalam. Tapi informasi dari Badan Pengelola Migas Aceh sudah ada juga investor yang berminat," ujarnya.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam bidang migas, namun belum dapat terdeteksi dengan baik karena keterbatasan riset dan teknologi. Diharapkan, ke depannya, akan ada kerjasama yang terpadu antara BPPT dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk observasi selanjutnya. ■

(eko/sc), Foto : Eko/Andri



# Infrastruktur Kupang Butuh Perhatian

Infrastruktur dan tata kota di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan perhatian. Pemerintah Pusat, kota yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini, membutuhkan anggaran Rp 178 miliar. Untuk pembangunan infrastruktur Kupang.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat acara forum diskusi infrastruktur Kota Kupang.

Demikian terungkap saat delegasi Komisi V DPR RI bertemu dengan Wali kota Kupang, Jefirstson Riwo Kore Kamis (26/10/2017). Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat berada di Kupang, mengatakan, pihaknya siap membantu dan memperjuangkan infrastruktur Kupang. Namun, katanya,

penganggarnya tidak bisa sekaligus digelontorkan, karena kota-kota lain di Indonesia juga butuh pembangunan infrastruktur.

Wali kota Kupang Jefirstson Riwo Kore berharap, pembangunan infrastruktur bisa terwujud seluruhnya di masa kepemimpinan dirinya. "Kami targetkan bisa terealisasi dalam masa

kepemimpinan kami. Namun, kami tak bisa lakukan sendiri. Untuk itu, kami butuh bantuan pusat melalui Komisi V," ujar Jefri penuh harap.

Dijelaskan Jefri, alokasi anggaran infrastruktur terbagi dua tahap. Tahap pertama Rp 90 miliar lebih dan tahap kedua Rp 80 miliar lebih. "Peran Komisi V sangat diharapkan. Dan kami juga sudah bicara dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, semoga saja dikabulkan," ujarnya. Selain akses jalan, pembangunan drainase dan air bersih di Kota Kupang juga jadi kebutuhan mendesak. Masyarakat setempat sangat mendambakan semua ini.

Ditambahkan Fary, kebetulan, pemerintah sedang fokus memberi perhatian ke kawasan Indonesia Timur. Politisi dari Fraksi Gerindra ini menyatakan, untuk NTT sejauh ini akses air bersih sudah sangat baik. Pemerintah Pusat dan Dirjen Sumber Daya Air sudah membantunya. Begitu pun penataan kota melalui Dirjen Pengembangan Infrastruktur Wilayah siap membantu. Tak ketinggalan Dirjen Pembiayaan Rumah juga segera membantu kebutuhan infrastruktur perumahan di Kupang, NTT.

Politisi asal Dapil NTT ini mengajak seluruh mitra Komisi V untuk terlibat dan membantu pemerintah kota mewujudkan terobosan-terobosan, agar Kupang menjadi kota modern dan humanis. ■



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI saat meninjau PLTP Tulehu di Maluku.

## PLTP Tulehu Diharapkan Jadi Sumber Energi Listrik di Maluku

Pengelolaan energi listrik di Provinsi Maluku dinilai masih belum merata. Hal ini disebabkan minimnya infrastruktur dan pengolahan energi, sehingga masyarakat lokal belum dapat merasakan manfaat atas kekayaan alam yang dimiliki.

Oleh sebab itu, kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu di Maluku diharapkan dapat menjadi sumber energi listrik bagi Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat mengunjungi PLTP Tulehu di Maluku, Senin (27/10/2017).

“Maluku butuh 50 MW lagi untuk saat ini dan untuk tenaga listrik ke depan, ketersediaan pembangkit listrik di Maluku ini masih di angka 60 MW. Jadi, harus terus dikembangkan pembangkit-pembangkit baru termasuk bagaimana mengeksplorasi sumber energi dari panas bumi hingga sampai di angka 100 MW,” paparnya.

Diketahui, PLTP Tulehu merupakan proyek dari PT. PLN (Persero) berkapasitas 2x10 MW. Proyek ini terletak di Desa Suli dan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. PLTP Tulehu menjadi PLTP pertama yang dibangun oleh PLN. PLTP ini ditargetkan beroperasi secara komersial COD (Commercial Operation Date) di tahun 2019. PLTP yang dibangun di lahan 1.920 ha tersebut akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Ambon.

“Dari 1200 desa yang ada di Maluku, masih ada 400 desa yang belum teraliri aliran listrik, hal ini menjadi tugas dari PLN. Musti dipikirkan bagaimana agar dapat menerangi seluruh desa-desa yang ada di Indonesia utamanya di

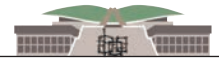
Maluku ini,” tegas politisi Demokrat ini

Kebutuhan masyarakat lokal akan listrik ke depannya, lanjut Herman, akan terpenuhi oleh PLTP ini kurang lebih 20 MW. “Tidak sampai di sini, tentu kalau kawasan ini berkembang dan kebutuhan listrik makin banyak maka berbagai pembangkit yang bersumber dari energi primer lainnya musti dikembangkan juga,” pungkas Herman.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada PLTP Tulehu karena dikelola langsung oleh PLN. Ia berharap agar PLN terus mencari sumber energi lain yang basisnya energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. “Bisa saja nanti ada energi matahari, karena ini akan menjadi energi masa depan kita bersama,” tutup Herman.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir anggota Komisi VII lainnya Mercy Chriesty, Katherine A. Oendoen, Tjatur Sapto, Bara Hasibuan, dan Peggi Patricia Pattipi. ■

(Jay/Sci) Foto : Jayadi/Andri



## Komisi VIII Dukung Pembangunan Pos Laut Tarakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan mengusulkan dibangunnya pos laut. Pembangunan pos-pos laut ini nantinya tidak hanya dapat menanggulangi perampokan di wilayah perairan Provinsi Kaltara saja tetapi juga diharapkan dapat membantu menanggulangi korban bencana dan kecelakaan di laut. Mengingat masyarakat Kaltara lebih banyak menggunakan jalur laut dari pada jalur lainnya untuk transportasi.

**M**enanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII yang juga Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, pos-pos terpadu memang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana di laut maupun di darat dan juga membutuhkan fasilitas selter pengungsi. Mengingat Kota Tarakan pernah mengalami bencana gempa yang cukup kuat.

“Untuk itu, DPR akan memperjuangkan agar kedua fasilitas tersebut dapat direalisasikan karena sangat dibutuhkan oleh Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD), Dan nantinya DPR akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait,” kata politisi Senayan dari Gerindra ini di Kaltara, Senin (30/10/2017).

Sementara itu, Kepala BPBD Tarakan Abdul Azis mengatakan, untuk selter pengungsi yang akan dibangun memang bukan hanya untuk pengungsi saat ada bencana saja, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Karena Tarakan menjadi tempat transit terbesar di Kaltara.

Lebih lanjut Azis menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan laut sendiri

memang baru saja dialami di Laut Tarakan, dimana semua peralatan berada di daratan sehingga cukup memakan waktu yang lama untuk bisa menanggulangi korban. Dengan adanya pos laut terpadu nantinya semua satuan pemerintah yang memiliki potensial untuk melakukan penanggulangan bencana dapat *stand by* di laut.

“Karena sesuai PP No. 18 tahun 2016, yang semula kami dengan PMK jadi satu dan sekarang dipisah sehingga arsip-arsip kami harus jadi satu untuk sementara. Untuk bencana di Kota Tarakan agak turun dibanding tahun 2015 lalu, tetapi sayangnya dukungan logistik dari BNPB di tahun 2017 kurang mencukupi, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu lebih dari 70% turunnya,” kata Azis saat memberikan paparan.

Menanggapi hal tersebut, Sodik Mudjahid menuturkan bantuan logistik untuk BPBD akan disesuaikan kondisi daerah. “Kita kan sudah tahu ada paket bantuan fisik untuk BPBD, sesuai tidak dengan standarnya, penyesuaian program sarana dan prasarana yang dianggarkan pemerintah kepada Komisi VIII dan kalau memang anggarannya sudah ada, tetapi memang harus dibagi untuk seluruh Indonesia. Itupun kalau memang bisa akan kami perjuangkan,” kata Sodik. ■

(hriso) Foto : EkaAndri



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dan Tim Kuncker Komisi VIII DPR RI saat melakukan pertemuan dengan BPBD Kota Tarakan di Kalimantan Utara

## Komisi V DPR Tinjau Pembangunan Infrastruktur Jambi

Komisi V DPR RI berkomitmen melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek yang dibiayai APBN, serta rencana proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2018 nanti dengan dana APBN 2018.



Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Sigit Sosiantomo (tengah) meninjau lokasi pelebaran Jalan Kota Jambi – Mendalo di Provinsi Jambi.

**D**engan anggaran belanja infrastruktur dalam APBN 2018 sebesar Rp 410,7 triliun Pemerintah mengklaim akan

fokus untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Senin (30/10/2017).

“Seperti diketahui APBN 2018, meski kenaikannya lebih rendah dibanding outlook (kebutuhan) tahun sebelumnya, namun jumlah ini masih mengalami peningkatan sebesar Rp 5,8 triliun dibanding tahun 2017 atau Rp 1,7 triliun dibanding RAPBN 2018,” jelas Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Saniatul Lativa mengatakan beberapa proyek di Jambi dibiayai oleh APBN. Politisi asal dapil Jambi itu pun berjanji akan mengawal pembangunan infrastruktur di Jambi agar tetap mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Kunjungan Komisi V DPR ke Jambi difokuskan di Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tebo. Beberapa proyek yang ditinjau Komisi V DPR yakni Bandara Muaro Bungo, pembangunan Jembatan Batang Bungo dan Batang Tebo, dan sejumlah proyek yang dibiayai APBN.

Selain itu, di Kota Jambi, Komisi V DPR juga meninjau pembangunan jembatan Batanghari 3, pelebaran jalan Mendalo, pembangunan Turap Danau Sipin, penanggulangan Banjir Kota Jambi, Rusunawa, jalan 2 Jalur ke Bandara dan akan bertemu Gubernur Jambi terkait pembangunan infrastruktur di Jambi. ■

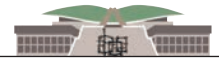
(skr/sc) Foto : Singgih/Andri

## SDM dan Anggaran BPOM Provinsi Kalbar Harus Ditambah

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran serta fasilitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalimantan Barat perlu ditambah. Karena menurutnya, Kalbar merupakan provinsi yang luas dan jangkauannya yang sangat sulit dilalui, banyak terjadi penyelundupan makanan dan obat-obatan kadaluarsa dari negara tetangga, Malaysia.

“Karena di Kalbar ini banyak pintu masuk bukan hanya bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi juga pintu masuk bagi makanan dan obat-obatan dari negara tetangga yang sudah tidak layak konsumsi dengan iming-iming diskon besar-besaran bagi para pembeli,” ungkap Ribka usai pertemuan tim Kunjungan Kerja Komisi IX dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan mitra kerja Komisi IX di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Jumat (26/10/2017)

Dalam kesempatan itu, Ribka mengapresiasi kinerja BPOM Provinsi Kalbar yang belum lama ini telah memusnahkan 4 truk kosmetik ilegal yang sengaja dimasukkan ke daerah ini. Ia mengimbau kepada seluruh BPOM di seluruh Indonesia jika ingin memusnahkan



# Komisi XI Dorong Program Pengentasan Kemiskinan di Kepri

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika mendorong adanya program pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mengingat terjadinya penambahan tingkat kemiskinan di pedesaan Kepri tersebut.



Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika saat melakukan pertemuan dengan jajaran mitra kerja Komisi XI DPR.

“Jadi di Provinsi Kepri ini angka kemiskinan itu terjadi peningkatan khususnya di wilayah pedesaan. Jika dibandingkan dengan perkotaannya tidak begitu terlihat peningkatannya. Hal ini bisa terjadi

karena program-program Pemerintah Provinsi untuk di wilayah pedesaan kurang menyentuh masyarakat sehingga tidak berdampak pada kurangnya kemiskinan,” ungkap Kardaya saat ditemui usai rapat dengan jajaran mitra

kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kepri, (26/10/2017).

Adapun hal lain yang turut menjadi sorotan perihal industri-industri yang ada di Batam, Kepri yang sedang tumbuh lesu. Kardaya menilai harga minyak yang turun menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

“Contohnya seperti yang terjadi pada industri galangan kapal, perminyakan itu umumnya bisa menyerap tiga ratus ribu tenaga kerja, tapi sekarang menurun hanya mampu menyerap 15 ribu. Karena harga minyak turun dan terlebih lagi karena investor-investor perminyakan banyak pindah ke negara lain seperti Vietnam. Sedangkan Batam, Kepri itu pada umumnya sangat tergantung kepada kegiatan itu,” jelasnya.

Senada dengan Kardaya, Anggota Komisi XI DPR RI Elviana turut menyayangkan adanya kesenjangan kemiskinan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan di Kepri. Ia turut mempertanyakan Dana Desa yang ada di Provinsi Kepri yang tidak berpengaruh besar dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Oleh karena itu kami berharap Pemprov dan Pemda yang ada di Kepri ini dalam pembagian dana desa bisa menyeluruh. Mungkin dalam hal penerimaan, masyarakat yang tinggal di pedesaan sedikit lebih lama menerima dibandingkan yang tinggal di kota. Tetapi jumlah dana desa tidak dibatasi oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan antara desa dengan kota,” tutupnya. ■

(tra/sc), (Foto : Tiara/Andri)

barang-barang ilegal jangan hanya simbolis saja, tetapi memusnahkan semua barang-barang tersebut.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa BPOM belum mempunyai payung hukum yang kuat agar bisa langsung menindak sesuatu yang ilegal, karena selama ini jika ada permasalahan yang terjadi BPOM hanya bisa melakukan pengawasan dan penindakannya diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Sejak awal saya menjadi Ketua Komisi IX DPR waktu itu, Komisi IX telah menawarkan agar BPOM ada payung hukum, tetapi justru BPOM tidak ada kemauan, kalau yang lain kan mereka yang mengejar DPR untuk dibuatkan payung hukumnya agar mereka mempunyai taring



Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning

untuk bertindak,” ungkap anggota dewan dapil Jawa Barat IV ini.

Ia mengharapkan, agar secepatnya BPOM dibuatkan payung hukum. Karena kalau masih belum memiliki payung hukum, BPOM tidak akan bisa untuk bertindak mengadili, hanya sebatas pengawasan. Untuk tindakan diberikan ke pihak berwajib.

“Kita kan tidak tahu jika kasus tersebut tidak diadili BPOM sendiri, apakah benar diproses atau tidak. Mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan ke judul awal dan kita berharap agar diserahkan kepada komisi saja. UU komisi dan bukan UU pansus, seperti UU TKI diserahkan ke komisi dan akhirnya selesai,” tutupnya. ■

(azka/sc), Foto : Azka/Andri

# Tahun 2018 Rastra Dihapus Pemerintah Wajib Lindungi Petani Beras

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap petani beras. Hal ini dikarenakan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebagai outlet dari Bulog, akan dihapus mulai tahun 2018.

**P**adahal tahun 2017, dari 55 kota di Indonesia tidak seluruhnya memberikan hasil yang maksimal untuk penggunaan kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Hal tersebut harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, terutama kepada masyarakat di kalangan bawah yang sudah terbiasa dengan rastra.

“Yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani untuk terus memproduksi beras, sehingga ketika outlet rastra tidak ada, dapat menjadi cadangan beras pemerintah, sehingga tidak akan mengganggu proses yang sudah ada,”

jelas Viva Yoga Mauladi di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (28/10/2017)

Ia merasa masih belum ada solusi yang disepakati bersama, oleh karena itu Komisi IV berjanji akan membahas hal tersebut lebih lanjut dengan pemerintah. Hingga saat ini, di NTT masih belum ada kartu bantuan pangan non-tunai. Politisi PAN ini menjelaskan bahwa Komisi IV masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, terutama bersama Bulog sebagai mitra kerja Komisi IV. Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah harus maksimal. Sementara

masyarakat NTT mengeluhkan cadangan beras yang dimiliki pemerintah masih kecil.

“Sebagai mitra kerja dari Bulog, kami akan terus mendorong Bulog dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya bisa maksimal dan bisa menjadi bagian dalam proses untuk pemberdayaan petani, kemudian dalam hal stabilisasi harga dan pasokan,” ungkapnya.

Viva meyakini bahwa Bulog sudah siap untuk mengelola pangan menjadi lebih baik. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah di tahun 2018 nanti, sudah tidak ada lagi outlet rastra karena akan digantikan dengan program bantuan pangan non-tunai. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap program penyerapan beras dan gabah petani oleh Bulog. Komisi IV akan segera membahas program pengganti rastra tersebut dengan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Kementerian Sosial. ■

(ica/sc), Foto : Ica/Andri



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi di saat memimpin kunjungan kerja komisi IV DPR RI, di Kupang, nusa Tenggara Timur.

# Komisi IX Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Insiden Pabrik Kembang Api



Suasana RDP Komisi IX DPR dengan Pemerintah terkait ledakan pabrik petasan.

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi dalam waktu satu bulan yang melibatkan kementerian dan lembaga secara mendalam terhadap insiden kecelakaan kerja di PT. Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, yang menewaskan 49 pekerjanya.

**H**al itu disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat membacakan kesimpulan saat RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Kabupaten Tangerang, Perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, Camat Kosambi, hingga Kepala Desa Belimbing.

“Kemudian memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Dede di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Kesimpulan berikutnya, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dan tempat kerja di perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan-bahan yang

mudah meledak dan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi IX DPR juga mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara berkala setiap enam bulan kepada perusahaan yang rentan memiliki resiko kecelakaan kerja, untuk memastikan bahwa standar keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuh Dede.

Sementara terhadap korban, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan kewajiban layanan terhadap para peserta yang menjadi korban sesuai dengan hak-hak

yang dimiliki korban. Pemerintah pun didesak untuk memastikan perusahaan membayarkan hak-hak pekerja yang menjadi korban kecelakaan.

“Yang terakhir, Komisi IX DPR mengajukan usulan revisi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sesuai dengan tuntutan keselamatan kerja saat ini sebagai usul inisiatif pemerintah, dan Komisi IX mengusulkan pembentukan Panja tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

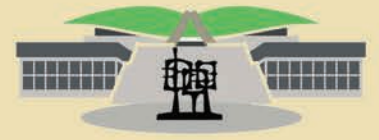
Sebelumnya, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja Maruli Hasoloan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya, PT. PBCS melanggar beberapa peraturan perundang-undangan.

Di antaranya, perusahaan diduga melanggar UU No. 7 Tahun 1981 Pasal 6 karena belum melapor Wajib Laporan Ketengakerjaan. Kemudian, pelanggaran terhadap UU No 13 Tahun 2003 Pasal 68 karena memperkerjakan pekerja di bawah umur, dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 karena membayar upah di bawah UMP yang ditetapkan, sebesar Rp 3,270 juta. Dan yang terakhir, perusahaan melanggar UU No. 1 Tahun 1970 karena tidak menyediakan sarana yang tidak sesuai dengan syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ■

(si/sc) foto: runi



Pimpinan Komisi IX DPR berbincang dengan pemerintah usai RDP



Wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon saat audiensi Buni Yani dan Tim Pengacara, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Kamis (2/11). Foto:Arief

Anggota Komisi I Arwani Thomafi di bersama pembicara lainnya hadir pada Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Verifikasi Parpol dan Rawan Gugatan" di Media Center, Gedung Nusantara III, Senaya, Jakarta, Kamis (2/11), Foto: Runi



Deputi Administrasi , Mardian Umar dan Kepala Biro Keprotokolan Setjen DPR RI, Suratna dalam acara *Launching Bimtek* di Gedung DPR RI, Senayan Rabu (1/11), foto: eno